

Prof. Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si.  
Ir. Gustina Siregar, M.Si. | Dr. Desi Novita, SP, M.Si.  
Faiz Ahmad Sibuea, SP, M.Si | Fitriani, SP.

# Model Koperasi Ideal

*dalam*  
Membangun  
Ekonomi Desa



Editor  
Teguh Imani Sibuea, SE  
Muthia Azzahra Sibuea

# *Model* Koperasi Ideal *dalam* Membangun Ekonomi Desa

Prof. Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si.  
Ir. Gustina Siregar, M.Si. | Dr. Desi Novita, SP, M.Si.  
Faiz Ahmad Sibuea, SP, M.Si | Fitriani, SP.

## Editor

Teguh Imani Sibuea, SE  
Muthia Azzahra Sibuea



---

**MODEL KOPERASI IDEAL  
DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA**

---

Ditulis oleh:

**Prof. Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si.  
Ir. Gustina Siregar, M.Si.  
Dr. Desi Novita, SP., M.Si.  
Faiz Ahmad Sibuea, SP., M.Si.  
Fitriani, SP.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Mei 2025

Editor  
Teguh Imani Sibuea, S.E.  
Muthia Azzahra Sibuea

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal  
Penata letak: Noufal Fahriza

**ISBN : 978-634-234-220-6**

x + 238 hlm.; 15,5x23 cm.

©Mei 2025

# PRAKATA

**A**lhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini akhirnya dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini merupakan hasil dari rangkaian kajian mendalam mengenai profil dan peran strategis Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pembangunan ekonomi perdesaan, dengan studi kasus di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Gagasan utama dalam buku ini adalah mengangkat koperasi sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat desa. Berbagai temuan dan pemikiran dalam buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model koperasi yang ideal—yakni koperasi yang relevan dengan kebutuhan anggota, berdaya saing, dan mampu membangun sinergi kelembagaan secara berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk pengayaan dan penyempurnaan edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dukungan dan pendanaan yang memungkinkan kajian ini terlaksana. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat dan instansi di Kabupaten

Langkat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses penulisan buku ini berlangsung.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi koperasi, pembuat kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap pembangunan ekonomi desa berbasis kelembagaan koperasi. Amin.

## **LEMBAR PENGESAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Muhammad Ilham Riyadh, SP, M.Si.**  
Jabatan : Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan

Dengan ini **MENGESAHKAN** bahwa **BUKU REFERENSI** berikut ini :

Judul : **MODEL KOPERASI IDEAL DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA**

Penulis : Prof. Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si.  
Ir. Gustina Siregar, M.Si.  
Dr. Desi Novita, SP, M.Si.  
Faiz Ahmad Sibuea, SP, M.Si.  
Fitriani, SP

Editor : Teguh Imani Sibuea, SE  
Muthia Azzahra Sibuea

adalah digunakan sebagai salah satu buku referensi dalam konteks pengayaan kompetensi mahasiswa terutama yang terkait dengan bidang kelembagaan ekonomi pertanian baik di dalam maupun di luar lingkungan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara.

*Billahittaufiq wal hidayah.-*

Disahkan di Medan tanggal 1 Juni 2025

**Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian  
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan**



**Dr. Muhammad Ilham Riyadh, SP, M.Si.**



# DAFTAR ISI

Prakata .....	iii
Lembar Pengesahan .....	v
Daftar Isi.....	vii

## **BAB I**

<b>PRAWACANA: MODEL KOPERASI IDEAL DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA .....</b>	<b>1</b>
---	----------

## **BAB II**

<b>KONSEP DASAR KOPERASI.....</b>	<b>7</b>
Pengertian Koperasi .....	7
Prinsip Koperasi.....	10
Alasan Menjadi Anggota Koperasi .....	12
Keberhasilan Koperasi .....	13
Kelebihan dan Kelemahan Koperasi.....	15

## **BAB III**

<b>KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN .....</b>	<b>19</b>
Koperasi dalam Sistem Ekonomi Sosialis.....	19
Koperasi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis.....	20
Koperasi dalam Sistem Ekonomi Campuran.....	23

## **BAB IV**

---

<b>KOPERASI DALAM STRUKTUR PASAR .....</b>	<b>25</b>
Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna.....	25
Koperasi dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna .....	34
Koperasi dalam Pasar Global.....	40

## **BAB V**

---

<b>DASAR PEMBANGUNAN INSTITUSI DAN PERAN KOPERASI.....</b>	<b>43</b>
Konsep Lembaga Pembaharu (Esman, Todaro).....	43
Hubungan Kelembagaan dengan Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	48
Institusi Ekonomi Berwatak Sosial dan Relevansi Koperasi .....	53
Karakteristik Koperasi Menurut Dulfer.....	59
Peran Strategis Koperasi dalam Ekonomi Desa.....	62

## **BAB VI**

---

<b>KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA PERUSAHAAN .....</b>	<b>69</b>
Pengertian Koperasi sebagai Badan Usaha.....	69
Tujuan dan Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi sebagai Institusi Usaha.....	74
Struktur Koperasi Berdasarkan Geografi.....	77
Struktur Koperasi Berdasarkan Pengawasan dan Bentuk Organisasi.....	81
Bentuk Baru Struktural Koperasi.....	84
Dinamika Adaptasi Koperasi terhadap Perkembangan Dunia Usaha .....	91

## BAB VII

<b>PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN TERHADAP KOPERASI.....</b>	<b>95</b>
Perbandingan Pendekatan Neo-Klasik dan Ekonomi Kelembagaan .....	95
Perspektif Ekonomi Kelembagaan (Struktur-Perilaku-Kinerja).....	99
Hak Kepemilikan ( <i>Property Rights</i> ) sebagai Aspek Kunci .....	102
Koperasi sebagai Koalisi Tujuan Beragam.....	105
Teori <i>Goal Programming</i> dan <i>Game Theory</i> dalam Manajemen Koperasi .....	109
Sistem Kontrak dan Perbedaan Pengambilan Keputusan dalam Koperasi.....	112
Dampak Kontrak terhadap Partisipasi dan Kinerja Koperasi.	116

## BAB VIII

<b>KINERJA KOPERASI DAN FAKTOR PENENTUNYA .....</b>	<b>119</b>
Permasalahan Koperasi di Tingkat Desa .....	119
Indikator Koperasi Mandiri (13 Kelayakan Kelembagaan) .....	122
Tantangan Operasional dalam Penerapan Konsep Ideal .....	125
Faktor-Faktor Penentu Kinerja.....	129
Model Keterkaitan Manajemen-Insentif-Partisipasi .....	133
Program Koperasi sebagai Pemicu Keterlibatan Anggota .....	136
Ilustrasi Koalisi Tujuan: Studi Kasus Pengurus, Manajer, dan Anggota .....	139

## BAB IX

<b>PERSPEKTIF AGRIBISNIS DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI.....</b>	<b>147</b>
Pembangunan Agribisnis sebagai Strategi Ekonomi Nasional.....	147

Ketimpangan Nilai Tambah dalam Sistem Agribisnis.....	152
Urgensi Pengusahaan Integrasi Vertikal .....	158
Koperasi sebagai Mekanisme Kelembagaan Agribisnis (Pasal 33 UUD 1945) .....	167
Pembentukan Koperasi Agribisnis sebagai Solusi Ekonomi Rakyat .....	170

## **BAB X**

### **KOPERASI IDEAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI**

<b>DESA</b> .....	<b>177</b>
Persepsi Koperasi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi.....	177
Aspek Pengurusan dan Kinerja Koperasi Unit Desa .....	196
Keberhasilan Koperasi dalam Membangun Ekonomi Desa....	208
Hubungan Karakteristik Anggota, Kapasitas Dasar, dan Kinerja terhadap Keberhasilan KUD .....	222

## **BAB XI**

<b>KONKLUSI</b> .....	<b>227</b>
Daftar Pustaka.....	229
Tentang Penulis .....	235

# BAB I



## PRAWACANA: MODEL KOPERASI IDEAL DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA

Untuk membangun struktur pedesaan yang maju dan progresif, terdapat tiga lembaga yang harus ada di desa dan tidak dapat ditawar-tawar, yaitu 1) lembaga pemasaran untuk sarana produksi pertanian; 2) lembaga penyuluhan atau pendidikan bagi petani; dan 3) lembaga keuangan atau pendanaan bagi petani.

Kehadiran institusi semacam ini seharusnya mampu menjadi wadah bagi keluhan serta persoalan petani dan memberikan solusi yang tepat. Sebuah institusi yang kuat dapat meminimalkan kelemahan petani dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani secara ekonomi dan memperbaiki sikap mental secara sosiologis (Mosher, 1966).

Kabupaten Langkat, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar. Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan harapan dapat merepresentasikan fenomena yang terjadi di lembaga koperasi di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Walaupun pada umumnya ciri-ciri koperasi di wilayah ini serupa, Kabupaten

Langkat tetap memiliki karakteristik khas yang tidak dijumpai di daerah lainnya.

Kelemahan mendasar dalam pemikiran ekonomi klasik, salah satunya, adalah anggapan bahwa faktor lingkungan—termasuk struktur kelembagaan—merupakan faktor eksternal yang dianggap tetap. Oleh karena itu, koperasi hanya digambarkan berdasarkan perilaku teknologinya. Pandangan ini menyerupai teori produksi yang cenderung melihat koperasi sebagai agregat (Pakpahan, 1990).

Tanpa disadari, cara pandang tersebut telah memengaruhi kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang, padahal lingkungan dan kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Menurut Todaro (1984), pembangunan ekonomi pedesaan mencakup enam unsur: 1) inovasi teknologi dan sosial; 2) informasi; 3) insentif; 4) infrastruktur; 5) investasi, dan; 6) institusi atau kelembagaan. Lima aspek pertama bersifat saling melengkapi, sedangkan aspek keenam berperan merekayasa kelima aspek lainnya.

Institusi yang ideal semestinya memiliki dua peran, yaitu sebagai organisasi ekonomi (*economic enterprise*) dan sekaligus sebagai organisasi kemanusiaan (*human association*). Lembaga tersebut juga perlu berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagai dasar demokrasi ekonomi.

Untuk memenuhi syarat ini, sebuah institusi perlu mencakup, 1) nilai budaya sebagai pranata sosial; 2) aspek pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat; 3) aspek ekonomi dengan kaidah rasional; dan 4) aspek gerakan yang bertujuan mengubah struktur kapitalistik menjadi demokrasi ekonomi. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah 1) anggota memiliki tujuan bersama; 2) semangat saling mendukung dan berjuang bersama; 3) kepemilikan bersama dan tanggung jawab kolektif; serta 4) peningkatan kesejahteraan anggota (Dulfer, 1979).

Bentuk institusi yang memenuhi kriteria tersebut dan telah banyak dibangun di desa-desa adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Pilihan terhadap KUD dilandasi oleh pertimbangan ideologis

# BAB II



## KONSEP DASAR KOPERASI

### Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Secara historis, pertumbuhan koperasi dapat ditelusuri melalui tiga jalur utama. *Pertama*, koperasi berkembang atas dorongan organisasi sosial dan politik yang menjadikan koperasi sebagai bagian dari gerakan masyarakat.

*Kedua*, koperasi tumbuh melalui peran aktif pemerintah yang menginisiasi dan memfasilitasi pendirian serta operasional koperasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. *Ketiga*, koperasi lahir dari inisiatif pribadi atau kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

Dari segi etimologi, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *cum* yang berarti bersama, dan *operari* yang berarti bekerja. Kedua kata tersebut membentuk istilah *co-operation* dalam bahasa Inggris, yang berarti kerja sama. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *coöperatieve vereniging*, yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja bersama antarindividu untuk mencapai tujuan tertentu secara kolektif dan demokratis.

1. Roy (1981)

Roy menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk pengelolaan usaha yang bersifat sukarela. Dalam koperasi, pembiayaan, kepemilikan modal, dan pengawasan berada di tangan anggota, yang sekaligus bertindak sebagai pengguna jasa dan penanggung risiko. Keuntungan yang diperoleh koperasi dibagikan secara profesional kepada seluruh anggota. Tujuan utama koperasi, menurut Roy, adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada anggotanya yang berperan sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi.

2. Ropke (1992)

Menurut Ropke, koperasi memiliki prinsip khas yang disebut *identitas ganda (identity criterion)*, yaitu pemilik dan pengguna jasa koperasi adalah orang yang sama. Berdasarkan prinsip tersebut, koperasi memiliki beberapa ketentuan penting, antara lain:

- a. Modal usaha berasal dari anggota yang juga menjadi pelanggan utama.
- b. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi.
- c. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tanpa bergantung pada besar kecilnya kontribusi modal.
- d. Tanggung jawab anggota bersifat tidak terbatas.

Ropke juga mengemukakan bahwa koperasi terdiri dari dua unsur utama:

- a. Kelompok koperasi (*cooperative group*), yang mencakup anggota beserta usaha atau pekerjaan mereka, rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, pengurus dan pengawas yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota, dan perusahaan

# BAB III



## KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

### Koperasi dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam sistem perekonomian sosialis, koperasi mendapatkan posisi strategis sebagai alat negara untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemerintah memiliki peran dominan dalam proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan koperasi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator utama melalui pemberian bantuan modal, pelatihan sumber daya manusia, serta akses terhadap sarana produksi dan pasar (Suharto, 2009).

Dukungan pemerintah dalam sistem ini memungkinkan koperasi berkembang lebih cepat dibandingkan dalam sistem ekonomi pasar. Koperasi dijadikan sebagai perpanjangan tangan negara untuk menjalankan berbagai program pembangunan, seperti penyaluran bantuan sosial, distribusi barang kebutuhan pokok, serta pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Koperasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan semangat kolektivisme yang menjadi ciri khas sistem sosialis (Laidler, 1995).

Namun demikian, keterlibatan negara yang sangat dominan dalam pengelolaan koperasi membawa konsekuensi serius terhadap

kemandirian koperasi itu sendiri. Koperasi menjadi terlalu tergantung pada intervensi pemerintah, baik dari aspek manajerial maupun operasional. Dalam praktiknya, keputusan strategis koperasi lebih banyak ditentukan oleh birokrasi negara ketimbang oleh aspirasi anggotanya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang menjunjung tinggi partisipasi demokratis dan kemandirian anggota (ICA, 2021).

Ketergantungan terhadap negara membuat koperasi tidak memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar dan kebutuhan anggotanya. Koperasi tumbuh bukan karena kekuatan internal yang berakar pada solidaritas ekonomi anggota, melainkan karena dorongan eksternal dari negara. Akibatnya, koperasi yang dibentuk dalam sistem sosialis cenderung memiliki daya tahan yang lemah ketika dukungan negara dihentikan atau dikurangi (Woolcock, 1998).

Dengan kata lain, koperasi dalam sistem sosialis mengalami perkembangan yang artifisial dan tidak berkelanjutan. Ia menjadi instrumen administratif negara, bukan sebagai organisasi ekonomi yang digerakkan oleh kesadaran dan kebutuhan anggotanya sendiri. Padahal, esensi koperasi sebagaimana dirumuskan oleh International Co-operative Alliance (ICA) adalah organisasi otonom yang dibentuk secara sukarela oleh individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Oleh karena itu, meskipun kehadiran koperasi dalam sistem ekonomi sosialis terlihat menguntungkan dari sisi dukungan dan perlindungan negara, namun dalam jangka panjang, kondisi ini justru menghambat penguatan prinsip kemandirian, tanggung jawab bersama, dan keberlanjutan koperasi secara institusional.

## Koperasi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Secara historis, koperasi muncul di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalis yang berkembang pesat di Eropa Barat pada masa Revolusi

# BAB IV



## KOPERASI DALAM STRUKTUR PASAR

### Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna

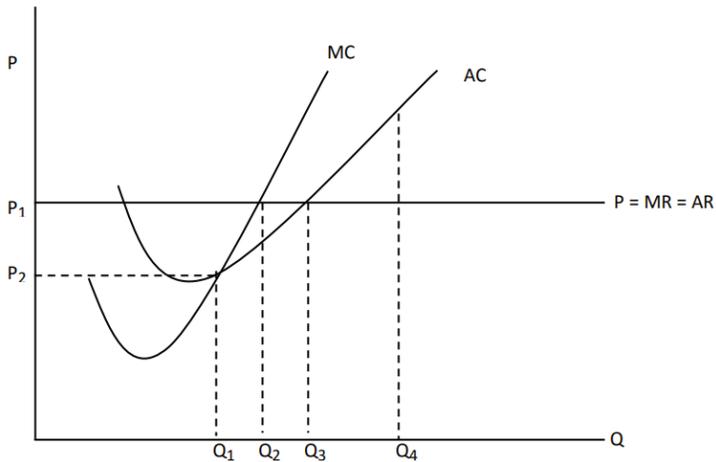
#### 1. Kondisi jangka pendek

Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk struktur pasar di mana semua pelaku ekonomi memiliki akses informasi yang setara, tidak ada hambatan keluar-masuk pasar, serta produk yang ditawarkan bersifat homogen. Dalam kondisi ini, koperasi sebagai badan usaha menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, koperasi dihadapkan pada tiga kemungkinan situasi: kemampuan setara (*same ability*), kemampuan lebih rendah (*lower ability*), dan kemampuan lebih tinggi (*higher ability*) dibanding badan usaha non-koperasi.

##### a. *Same ability*

Dalam jangka pendek pada pasar persaingan sempurna, apabila kemampuan produksi koperasi setara dengan pelaku usaha non-koperasi, maka situasi ini cenderung tidak memberikan keuntungan bagi koperasi. Hal ini disebabkan

karena biaya produksi dan harga jual yang ditetapkan koperasi menjadi sama dengan yang berlaku di kalangan pelaku usaha non-koperasi. Kondisi tersebut dapat diamati melalui kurva yang disajikan pada bagian berikut.  $P_{kop}$  sama dengan  $P_{non\ kop}$  ( $P = Price = Harga$ )



MC Koperasi = MC Bukan Koperasi

AC Koperasi = AC Bukan Koperasi

**Gambar 4.1** Kondisi Koperasi dengan Kemampuan Setara dalam Jangka Pendek

Pada tahap awal pendirian, kondisi koperasi dalam pasar persaingan sempurna masih dapat dikatakan layak, karena koperasi masih mampu bersaing dengan pelaku usaha non-koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu—misalnya setelah satu tahun—koperasi mulai mengalami kesulitan bersaing.

Hal ini terjadi karena kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi cukup terbatas, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran para anggotanya. Berbeda dengan badan usaha non-koperasi, yang umumnya dikelola oleh pemilik modal

# BAB V



## DASAR PEMBANGUNAN INSTITUSI DAN PERAN KOPERASI

### Konsep Lembaga Pembaharu (Esman, Todaro)

Pembangunan wilayah, terutama di daerah pedesaan, tidak hanya membutuhkan strategi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan lembaga-lembaga yang berperan sebagai agen pembaruan sosial. Dalam konteks ini, gagasan mengenai lembaga pembaharu menjadi penting untuk dikaji sebagai instrumen yang mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep lembaga pembaharu telah banyak diangkat oleh para ahli, termasuk Esman (1972) dan Todaro (1984), yang memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas peran lembaga dalam dinamika pembangunan.

Menurut Esman (1972), suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai lembaga pembaharu apabila memiliki dua karakteristik utama yang bersifat ganda, yakni dari segi struktur internal dan fungsi eksternalnya:

## 1. Ketahanan dan Dinamika Internal

Lembaga pembaharu harus memiliki struktur organisasi yang tidak hanya teknis dan efisien, tetapi juga sosial dan kultural yang lestari. Artinya, lembaga tersebut tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif secara mekanis, tetapi harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, budaya, dan politik di lingkungannya. Ciri penting lainnya adalah sustainability, yaitu kemampuan lembaga untuk terus bertahan dan berevolusi dalam jangka panjang, tanpa bergantung secara eksklusif pada bantuan eksternal.

Lembaga pembaharu juga harus berfungsi sebagai “vehicle of innovation” atau wahana inovasi. Inovasi di sini tidak terbatas pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup inovasi kelembagaan, seperti cara baru dalam mengorganisasi masyarakat, mekanisme partisipasi, metode pelayanan publik yang responsif, hingga pengembangan nilai dan norma sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

## 2. Konektivitas Eksternal dan Ekosistem Institusional

Selain kuat secara internal, lembaga pembaharu juga harus mampu menjalin hubungan strategis dengan organisasi lain, baik berupa hubungan ketergantungan (interdependence), dukungan (support), maupun peran pelengkap (complementary). Dalam konteks ini, lembaga pembaharu berfungsi sebagai simpul dalam ekosistem kelembagaan yang saling menopang, sehingga setiap institusi lokal tidak berjalan secara terisolasi.

Interaksi kelembagaan ini akan memperkuat kapasitas kolektif wilayah dalam merespons tantangan pembangunan. Sebagai contoh, lembaga pembaharu di bidang pertanian seperti koperasi petani atau lembaga penyuluhan harus terhubung dengan lembaga riset, lembaga pembiayaan, serta pasar lokal dan regional, agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Ekowanti dan Dewi, 2015).

# BAB VI



## KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA PERUSAHAAN

### Pengertian Koperasi sebagai Badan Usaha

Dalam sistem perekonomian nasional maupun global, koperasi menempati posisi yang unik sebagai badan usaha yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kepentingan anggota. Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan ekonomi, maka koperasi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang berfungsi seperti perusahaan, namun memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari perusahaan kapitalis.

Koperasi bukan sekadar organisasi sosial, melainkan institusi perusahaan yang didirikan untuk mempermudah kegiatan ekonomi anggotanya. Melalui koperasi, individu-individu yang memiliki keterbatasan sumber daya secara perorangan, baik dari segi modal, akses pasar, maupun teknologi, dapat bersatu untuk membentuk kekuatan ekonomi bersama. Inilah esensi koperasi sebagai sarana untuk mencapai skala usaha yang lebih ekonomis atau *economies of scale*, yang sulit dicapai jika dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dalam praktiknya, koperasi mengkonsolidasikan sumber daya ekonomi anggotanya untuk melakukan pembelian bahan baku

secara kolektif, produksi bersama, atau pemasaran hasil usaha dalam satu jaringan usaha yang terorganisir. Konsep skala usaha ekonomis ini berarti bahwa biaya produksi atau distribusi per unit dapat ditekan, karena koperasi melakukan transaksi dalam jumlah besar dan terkoordinasi. Misalnya, petani kecil yang tergabung dalam koperasi pertanian dapat membeli pupuk dan benih secara kolektif dengan harga lebih murah karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar. Dalam pemasaran hasil panen, koperasi juga berperan sebagai penghubung langsung dengan pasar atau industri pengolahan, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan memaksimalkan pendapatan petani.

Kedudukan koperasi sebagai badan usaha diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa koperasi memiliki status sebagai badan hukum dan entitas bisnis yang sah, yang tunduk pada sistem hukum nasional dan peraturan yang berlaku bagi semua jenis badan usaha di Indonesia. Dalam praktiknya, koperasi memiliki kewajiban administratif dan legal sebagaimana badan usaha lainnya. Untuk dapat beroperasi secara resmi, koperasi harus memiliki:

1. Akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM,
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai subjek pajak badan,
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau kini Nomor Induk Berusaha (NIB),
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika koperasi menjalankan usaha perdagangan,

# BAB VII



## PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN TERHADAP KOPERASI

### Perbandingan Pendekatan Neo-Klasik dan Ekonomi Kelembagaan

Kajian mengenai perilaku lembaga-lembaga ekonomi tidak terlepas dari fondasi teoritis yang digunakan sebagai acuan dalam memahami proses dan dinamika pengambilan keputusan. Dua pendekatan utama yang paling berpengaruh dalam ekonomi mikro modern adalah pendekatan neo-klasik dan pendekatan ekonomi kelembagaan. Keduanya menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap bagaimana entitas ekonomi berperilaku, menetapkan tujuan, serta berinteraksi dalam struktur sosial dan pasar yang kompleks.

Pendekatan neo-klasik merupakan aliran utama dalam teori ekonomi konvensional. Pendekatan ini bertumpu pada asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau utilitas dalam setiap keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, pasar diasumsikan berjalan secara kompetitif sempurna, di mana semua pelaku memiliki informasi lengkap, barang dan jasa bersifat homogen, dan tidak ada satu pun

pelaku pasar yang mampu memengaruhi harga secara individual. Selain itu, pendekatan ini mengasumsikan bahwa:

1. Faktor produksi menerima imbalan yang sepadan dengan kontribusi marjinalnya. Dalam pendekatan ini, tenaga kerja, modal, dan tanah dianggap memperoleh pendapatan berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap proses produksi. Upah, bunga, dan sewa ditentukan oleh nilai tambah marjinal masing-masing faktor, sehingga distribusi dianggap efisien dan adil dari sisi pasar.
2. Preferensi konsumen dianggap tetap dan seragam di seluruh populasi. Model neo-klasik mengasumsikan bahwa selera konsumen tidak berubah dalam jangka pendek dan bersifat rasional. Hal ini mempermudah analisis perilaku konsumen, namun mengabaikan pengaruh budaya, tren, dan perbedaan individu yang sering terjadi dalam kenyataan.
3. Aspek organisasi dan struktur kelembagaan diabaikan. Pendekatan ini tidak memperhatikan bagaimana perusahaan atau institusi diatur secara internal. Perusahaan dilihat hanya sebagai unit produksi yang berfungsi memaksimalkan laba, tanpa mempertimbangkan peran struktur organisasi atau mekanisme manajemen.
4. Pengaruh sosial, politik, dan budaya dianggap sebagai faktor eksternal. Faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, kekuasaan politik, dan nilai budaya tidak dimasukkan dalam model utama. Padahal dalam kenyataannya, faktor-faktor ini sering kali memengaruhi keputusan ekonomi secara signifikan.
5. Masalah pemerataan dan keadilan sosial dipisahkan dari efisiensi ekonomi. Neo-klasik fokus pada efisiensi alokasi sumber daya, bukan pada distribusi hasil. Ketimpangan atau keadilan dianggap urusan kebijakan sosial yang terpisah dari analisis ekonomi pasar.

Dalam konteks ini, perilaku perusahaan dan konsumen dirumuskan dalam model matematis yang ketat, dengan penekanan

# BAB VIII



## KINERJA KOPERASI DAN FAKTOR PENENTUNYA

### Permasalahan Koperasi di Tingkat Desa

Koperasi di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah ekonomi masyarakat sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan komunitas lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak koperasi desa mengalami berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan idealnya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor struktural, kultural, dan manajerial.

Menurut Soekartawi (1999), terdapat tiga permasalahan utama yang secara umum menghambat perkembangan koperasi di tingkat desa. Permasalahan-permasalahan ini bersifat fundamental dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang sistematis dan berkelanjutan.

Pertama, rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Banyak anggota belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, hak dan kewajiban sebagai anggota, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui keanggotaan aktif. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam aktivitas koperasi cenderung pasif dan formalitas semata. Partisipasi

yang lemah ini berdampak pada lemahnya basis demokrasi koperasi, serta mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan kolektif maupun kontribusi dalam permodalan dan kegiatan usaha.

Kedua, kelemahan dalam aspek manajemen usaha koperasi. Pengelolaan koperasi di tingkat desa umumnya belum dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Masih banyak koperasi yang mengelola keuangannya secara manual, tanpa perencanaan bisnis yang terstruktur atau strategi pengembangan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Akibatnya, koperasi tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lain, bahkan dalam skala lokal. Kurangnya sistem evaluasi dan monitoring internal juga menyebabkan ketidakefisienan operasional dan ketidakjelasan arah usaha koperasi.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan manajer koperasi, masih relatif rendah. Banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi secara profesional. Pelatihan dan pendampingan seringkali belum menjangkau seluruh koperasi desa secara merata, sehingga pengelolaan masih bersifat tradisional dan bergantung pada pengalaman semata. Kurangnya kemampuan dalam hal perencanaan usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, hingga hubungan dengan lembaga keuangan eksternal menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kinerja koperasi.

Ketiga persoalan di atas memperlihatkan bahwa keberlangsungan dan keberhasilan koperasi di desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan anggota, kapasitas kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia. Maka, untuk mendorong koperasi agar benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat di perdesaan, perlu dilakukan penguatan secara menyeluruh, baik dari sisi pendidikan anggota, peningkatan kompetensi pengurus, maupun revitalisasi manajemen usaha koperasi itu sendiri.

Kelemahan struktural ini menyebabkan koperasi unit desa kerap tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun secara hukum

# BAB IX



## PERSPEKTIF AGRIBISNIS DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

### Pembangunan Agribisnis sebagai Strategi Ekonomi Nasional

Kegagalan dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi pada masa lalu, ditambah dengan dampak krisis ekonomi yang berlangsung berkepanjangan, telah memunculkan serangkaian persoalan serius dalam perekonomian nasional. Ketidaktepatan arah kebijakan dan lemahnya fondasi ekonomi menyebabkan berbagai dampak negatif yang saling berkaitan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Ismail dan Muhammad, 2020).

Masalah-masalah seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita, serta memperluas kesenjangan antarwilayah menjadi gejala nyata dari kegagalan sistemik tersebut. Ketimpangan distribusi sumber daya dan hasil pembangunan turut memperparah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal (Maulana dkk., 2022).

Di sisi lain, ketahanan pangan yang belum kokoh menjadikan masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Besarnya utang luar negeri menambah beban fiskal negara, sementara

degradasi lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa perhitungan jangka panjang turut memperparah kerentanan ekologi nasional. Tidak hanya itu, keterbelakangan ekonomi di banyak daerah menunjukkan masih lemahnya orientasi pembangunan yang inklusif dan berbasis pada potensi lokal.

Berbagai persoalan tersebut membentuk lingkaran masalah yang kompleks, yang jika tidak segera ditangani dengan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan, akan terus menghambat upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menghadapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks dan saling terkait, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang tajam, terfokus, dan tepat sasaran. Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga dirancang agar tidak menimbulkan dampak negatif baru bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dipilih perlu memenuhi sejumlah karakteristik penting agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Pertama, strategi tersebut harus memiliki cakupan yang luas dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi secara simultan. Artinya, strategi yang diambil tidak hanya menyelesaikan satu jenis masalah, melainkan mampu mereduksi sebagian besar persoalan yang ada secara terpadu. Dengan pendekatan seperti ini, implementasi strategi akan memberikan dampak yang signifikan dan menyeluruh terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional.

Kedua, strategi pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Artinya, strategi tersebut tidak boleh terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal, seperti pinjaman luar negeri atau impor dalam jumlah besar. Ketergantungan semacam ini justru berisiko memperbesar beban utang luar negeri Indonesia yang sudah tinggi dan mengancam stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

# BAB X



## KOPERASI IDEAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

### Persepsi Koperasi sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi

Kehadiran Koperasi Unit Desa (KUD) telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat pedesaan, khususnya mereka yang mayoritas bekerja sebagai petani. KUD hadir sebagai lembaga multifungsi yang menjalankan berbagai peran. Namun, karena cakupan peran yang terlalu luas, tidak jarang fungsi utamanya menjadi tidak jelas dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa menjadi kurang signifikan.

Sumbangan KUD terhadap pembangunan ekonomi pedesaan dapat terlihat dari beragam aktivitas usaha yang dijalankan, baik yang sesuai dengan fungsi utama koperasi maupun yang tidak sepenuhnya terkait. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa jenis unit usaha yang umum dijalankan oleh KUD, antara lain:

1. Unit simpan pinjam (perkreditan).
2. Unit pengangkutan hasil pertanian anggota.
3. Warung serba ada (waserda) yang menyediakan kebutuhan rumah tangga anggota.

4. Unit penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, dan benih.
5. Usaha kerja sama operasional dengan lembaga lain, seperti perusahaan listrik negara (pln), penyedia air bersih, dan instansi terkait lainnya.

Selain kegiatan ekonomi, KUD juga menjalankan fungsi sosial dan edukatif yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan anggota. Kegiatan tersebut antara lain berupa rapat mingguan, bulanan, atau tahunan, serta pelatihan, kursus, dan penataran. Meskipun kontribusi kegiatan ini tidak dapat diukur secara materiil, proses tersebut merupakan bentuk investasi intelektual yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mosher (1987) yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan desa yang maju, dibutuhkan keberadaan tiga jenis lembaga utama, yaitu:

1. Lembaga pemasaran hasil produksi.
2. Lembaga penyedia modal atau pembiayaan.
3. Lembaga pendidikan atau penyuluhan pertanian.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa KUD telah menjalankan peran sebagaimana dimaksud oleh Mosher. Namun, untuk menilai peran KUD sebagai lembaga pendidikan, pelatihan, atau penataran, diperlukan indikator yang berbeda dari penilaian peran ekonomi biasa. Padahal, jika fungsi edukatif tersebut dijalankan secara serius dan konsisten, maka manfaatnya akan sangat besar. Anggota koperasi akan semakin terampil dalam berpikir, merencanakan, dan menjalankan usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka.

Keberadaan KUD sebagai lembaga ekonomi desa tentunya akan mendapat beragam tanggapan dari para anggota maupun pengurus. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, persepsi masyarakat

# BAB XI



## KONKLUSI

**M**odel Koperasi Unit Desa (KUD) yang efektif adalah model yang disesuaikan dengan karakter dan potensi masyarakat desa. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat desa membutuhkan pendekatan koperasi yang kontekstual agar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata. Keberhasilan koperasi dalam membangun ekonomi desa dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu karakteristik anggota, kemampuan dasar, pengelolaan yang baik, dan kinerja koperasi secara keseluruhan.

Membangun institusi koperasi yang kuat dengan memanfaatkan potensi masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan ekonomi desa berbasis agribisnis. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberdayaan internal dan kolaborasi antara anggota untuk menciptakan koperasi yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam dinamika pasar lokal maupun global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Taufiq Muhammad. 2021. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Pur-balingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Abidin, Jenal, Rezka Fedrina, dan Revi Agustin. “Penguatan Kelembagaan Desa Wisata *melalui Promosi Digital Marketing* di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang”. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 3(1): 1—10. 2022.
- Akbar, Ilham. 2022. “REKONSTRUKSI PENGATURAN KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA”. Disertasi Univesitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Aliim, Tahrizi Fathul dan Rudi Saprudin Darwis. “PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DESA WISATA”. *Share: Social Network Journal*, 13(2): 248—258. Februari, 2024.
- Apriliani, Dina, dkk. “Transformasi Agribisnis: *Paradoks Peningkatan Produksi Padi* di Tengah Penurunan Luas Panen Antarwilayah NTB 2018-2023”. *ALETHEIA: Jurnal Sosial dan Humaniora, Inovasi, Ekonomi, dan Edukasi*, 1(2): 61—70. 2024.
- Asnuryati. “Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal”. *Innovative: Journal of Social Science Research* 3(2): 2175—2183. 2023.

- Bahri, Ade Mazhar. A. 2021. “TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA SUATU ANAK PERUSAHAAN DI TINJAU DARI KONSEP PENATAAN *KEMBALI HUTANG PERUSAHAAN (CORPORATION DEBT RESTRUKTURING)*”. Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. 2022. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Malang: Ahlimedia Book.
- Dulfer, E. ed. 1979. Cooperative. London: Quiler Press*
- Ekowanti, Mas. R. L., dan Dewi Casmiwati. 2015. PEMBANGUNAN LEMBAGA DARI KONSEP KE APLIKASI. Surabaya: Hang Tuah University Press.
- Esman, M.J. 1972. *The Element of Institution Building*. Dalam Joseph W Eaton: *Institution Building and Development*. London: SAGE Publications, *Beverly Hills*.
- Fahrani, Anggita, dan Rizka Syafriana. “Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi”. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 3(2): 132—144. 2023.*
- Fauziyyah, Aathifah, dkk. “JENIS-JENIS KOPERASI DAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA”. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi, 3(4): 1—13. 2023.*
- Fitriani, dkk. “Lini Hulu Produksi Sawit Indonesia: Perspektif Rantai Pasok”. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 21(2): 143—157. 2022.*
- Granovetter, M. “*Tindakan ekonomi dan struktur sosial: Masalah keterhubungan*”. *Jurnal sosiologi Amerika, 91(3). 1985: 481—510.*
- Hasang, Ismail, dan Muhammad Nur. 2020. *Perekonomian Indonesia*. Ahlimedia Book.

- Hasibuan, Yazidil Hafiz. 2022. “STRATEGI KOPERASI SERBA USAHA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: KOPERASI SERBA USAHA MUARA BAIMBAI, DESA SEI NAGALAWAN, KEC PERBAUNGAN, KAB SERDANG BERDAGAI)”. Skripsi pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hikmah, Faiqoh Nurul. “Tembakau Jember dalam Kerangka Teori Ketergantungan: Dinamika Ekonomi Lokal dan Pengaruh Global”. SRODJA: Sroedji Journal Administration, 2(1): 132—146. 2025.
- Hoetoro, A. 2017. *Ekonomika industri kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Jaya, W. K. 2021. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Juliyanto, M. S., dkk. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, Dan Keynesian”. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3). 2024: 377—385.
- Lestari, Dhoya Safira Tresna, dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin. “Program Industrialisasi dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1): 288—297. 2022.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, dan Rofila Salsabila. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2): 91—110. 2024.
- Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1): 220—229. 2022.

- Nugraha, Romi, dkk. “Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Penyuluhan Pertanian berbasis *Agribisnis di Desa Cenrana* Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1): 811—824. 2024.
- Nurmalasari, Aisyah. “Dinamika Skalabilitas Koperasi dari Tingkat Desa ke Regional”. *Jurnal Studi Pembangunan*, 15(1): 77—92. 2023.
- Pasaribu, Ryan Irwansyah dan Kusmilawaty. “Analisis Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Anggotanya* (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan)”. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(2): 359—368. April, 2024.
- Puspitarini, Renny Candradewi, Imam *Sucahyo*, dan *Andhi Nur Rahmadi*. “Analisis Tematik Dampak Sosial-Ekonomi Jalan Tol *Probolinggo* terhadap Petani Muneng”. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2): 130—148. 2025.
- Ramadani, Ainun. “Peran Koperasi Dalam *Perekonomian Di Indonesia*”. *Center for Open Science*. 2022.
- Rastana, I Dewa, I Nyoman Ariana. G., Bagus Arya K. “ANALISIS PERBEDAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA DAN RENTABILITAS KOPERASI DI KECAMATAN MARGA DAN TABANAN KABUPATEN TABANAN”. *Majalah Ilmiah Untab*, 15(1): 93—97. Maret, 2018.
- Sakti, Rini dan Ahmad Furqon. “Pembangunan Wilayah Berbasis Keterpaduan Sektor: Studi di Kawasan Perdesaan Jawa Barat”. *Jurnal Karwistara*, 10(1): 55—69. 2020.
- Saragih, Bungaran. “*Pembangunan Sistem Agribisnis* di Indonesia dan Peranan Public Relation”. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2): 43844. 2003.

- Setiawan, Bambang. “Koperasi sebagai Cooperative Enterprise: Kajian Filosofis Pemikiran Dulfer”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Koperasi*, 12(3): 221—235. 2021.
- Setiawati, Rosti. 2023. Inovasi Koperasi di Era Globalisasi dan Digitalisasi. *In: Modernisasi Koperasi Peluang dan Tantangan*. Universitas Koperasi Indonesia, 25-38.
- Suciati, Luh Putu, dkk. “Peran Kelembagaan Perdesaan untuk Keberlanjutan Penerapan SRI di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2): 109—127. Januari, 2014.
- Tambunan, T. T. 2021. *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Todaro, M.D. 1984. *Economic Development in The Third World*. Second Edition. London: Longman.
- Utami, Santi Muji, dan Antari Ayuning Arsi. “Lingkungan Perdesaan: Sebuah Tantangan Perubahan Bagi Masyarakat Pegunungan”. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang*, 1: 90-120. 2022.
- Warsono. “Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945”. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1): 91—104. 2016.
- Widiyana, I. P. A., Yogantara, K. K., & Dwitrayani, M. C. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung”. *Journal Research of Accounting*, 1(1). 2019: 1—11.



## TENTANG PENULIS



### **Prof. Dr. Ir. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si.**

Prof. Dr. Ir. H. Mhd. Buhari Sibuea, M.Si; Lahir di Tanah Lapang Porsea, Kabupaten Tobasa pada tanggal 4 Nopember 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1990 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.

Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 tahun 1997 pada Program Studi PWD (Perencanaan Wilayah Daerah dan Pedesaan) Universitas Sumatera Utara Medan. Dan terakhir menyelesaikan pendidikan Doktoral S3 tahun 2011 pada Institute of Postgraduate Studies di University of Malaya Kuala Lumpur Bidang Konsentrasi Human Development Studies.

Pada tahun 2021 meraih Professor Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Dosen PNS Lembaga Layanan Dikti Wilayah-I Sumut dpk Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian). Selain itu juga aktif sebagai staf pengajar dan pembimbing mahasiswa di Program Studi Magister Agribisnis dan Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area (UMA) Medan dan Universitas Sumatera Utara.



**Ir. Gustina Siregar, M.Si.**

Ir. Gustina Siregar, M.Si; Lahir di Padang Sidempuan tanggal 27 Agustus 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988 dan S2 pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2010.

Saat ini bertugas sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saat ini juga sedang menjabat sebagai wakil ketua Pusat Kewirausahaan Inovasi dan Inkubator Bisnis (PUSKIBI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



**Dr. Desi Novita, SP., M.Si.**

Dr. Desi Novita, S.P., M.Si. Lahir di Medan, 02 November 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UISU. Lulus S1 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (FP IPB) Tahun 2004. Lulus Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan peminatan Ekonomi Pertanian di Universitas Sumatera Utara (SPs USU) tahun 2009 dan Lulus Program Doktor Ilmu Pertanian USU tahun 2024.

Penulis juga aktif dalam berbagai penelitian dan sebagai analis di Mahatani Institut dan LPM Equator yang bekerjasama Bank Indonesia, Kementerian Sosial, kementerian Pertanian serta instansi lainnya. Penulis aktif sebagai Pengurus Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Medan.



**Faiz Ahmad Sibuea, SP, M.Si.**

Faiz Ahmad Sibuea, SP, MSi; Lahir di Medan pada tanggal 16 Mei 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2016 pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Setelah itu, menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2020 pada Program Studi Agribisnis IPB (Institut Pertanian Bogor).

Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap di Universitas Medan Area Program Studi Agribisnis dan saat ini menjabat sebagai Kepala GKM (Gugus Kendali Mutu) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Dan juga aktif sebagai staf pengajar di program Studi Agribisnis UISU (Universitas Islam Sumatera Utara).



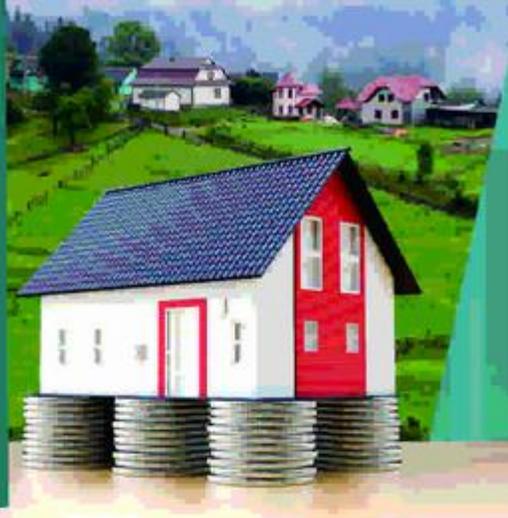
**Fitriani, SP.**

Fitriani, SP; Lahir di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Maret 1995. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2022 di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Program Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UISU (Universitas Islam Sumatera Utara) Medan.



# Model Koperasi Ideal

dalam  
Membangun  
Ekonomi Desa



**G**agasan utama dalam buku ini adalah mengangkat koperasi sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat desa. Berbagai temuan dan pemikiran dalam buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model koperasi yang ideal—yakni koperasi yang relevan dengan kebutuhan anggota, berdaya saing, dan mampu membangun sinergi kelembagaan secara berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk pengayaan dan penyempurnaan edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dukungan dan pendanaan yang memungkinkan kajian ini terlaksana. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat dan instansi di Kabupaten Langkat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses penulisan buku ini berlangsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi koperasi, pembuat kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap pembangunan ekonomi desa berbasis kelembagaan koperasi. Amin.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📧 @litnuspenerbit  
📄 literasinusantara  
☎ 085755971589

Ekonomi +17

